

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Konsep penting yang perlu dipahami dalam rangka membahas masalah kaum perempuan adalah membedakan antara konsep seks (jenis kelamin) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan terhadap kedua konsep tersebut diperlukan karena pemahaman dan perbedaan antara konsep seks dan gender sangatlah diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan-persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Namun yang terjadi dalam masyarakat kurangnya pengetahuan kesetaraan gender dan keadilan gender yang disebabkan oleh kuatnya tradisi dan budaya masyarakat yang masih melanggengkan stereotip gender (Fakih 2016, hlm. 3). Masyarakat Indonesia sebagian besar menganut sistem patriarki, dimana meletakkan posisi dan kekuasaan laki – laki lebih dominan dibandingkan perempuan. Dalam kehidupan sehari – hari, masyarakat memandang perempuan sebagai seorang yang dianggap lemah dan tidak berdaya.

Budaya ketidakadilan gender dalam masyarakat membuat perempuan kerap kali mendapat label negatif didalam masyarakat yaitu sebagian besar perempuan yang tampil bersolek dan berdandan dengan menggunakan pakaian yang agak ketat dan seksi yang selalu dipahami sebagai mengundang lawan jenis untuk melakukan pelecehan seksual, hal ini kemudian selalu dikaitkan dengan pelabelan tersebut artinya jika terjadi pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan masyarakat cenderung menyalahkan korbannya atau melakukan *victim blaming*.

Harapan masyarakat berdasarkan budaya nilai dan norma yang ada dalam masyarakat bahwa perempuan harus menjaga harkat martabatnya dengan tidak tampil bersolek, berdandan, dan tidak menggunakan pakaian yang agak ketat dan seksi atau perempuan di harapkan dapat berpakaian tertutup dan menghindari tempat-tempat sepi agar tidak terjadi pelecehan seksual, hal tersebut menjadi tuntutan masyarakat bagi perempuan. Namun realitas yang terjadi dimasyarakat bahwa pelecehan seksual yang

dilakukan sebagian besar oleh kaum laki-laki ini tidak melihat bagaimana cara perempuan berpakaian banyak kasus yang justru perempuan yang berpakaian tertutup pun menjadi korban pelecehan seksual. Secara keseluruhan, data yang dikumpulkan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sepanjang tahun 2019 tercatat 406.178 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk didalamnya kasus pelecehan seksual, Pada ranah publik berarti kasus pelecehan seksual dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kekerabatan darah ataupun perkawinan artinya pelaku bisa jadi tetangga, guru, teman, tokoh masyarakat ataupun orang yang tidak di kenal. Komnas Perempuan mencatat 394 kasus pelecehan terhadap perempuan akibat identitas gender yang berbeda dan orientasi seksual.

Data di atas memperlihatkan bentuk ketidakadilan gender dalam bentuk pelecehan seksual pada perempuan hal ini menjadi hal yang biasa dan bagian dari keseharian banyak kaum perempuan dalam masyarakat, karena budaya cara pandang maskulin yang dianggap perempuan adalah obyek seks masih kuat. Budaya patriarki telah menguasai dan mengungkung cara berpikir dan bertindak, dengan tidak mengakomodasi kesetaraan jenis kelamin. Hubungan laki-laki dan perempuan menjadi hubungan subordinasi, dalam wujud dominasi laki-laki terhadap perempuan (Satu harapan, 2016). Walaupun Korban pelecehan seksual tidak selalu adalah perempuan dan pelaku selalu laki – laki namun jumlah dan proposi dimana laki-laki sebagai korban pelecehan seksual oleh perempuan terlalu kecil dibanding dengan jumlah korban pelecehan seksual perempuan oleh laki-laki. Hal ini merujuk pada Offerman dan Malamut (dalam Santoso dan Bezaleel, 2018, hlm. 15) yang menunjukkan “Sebagian besar korban adalah perempuan dan pelaku adalah laki-laki.

Realitas terhadap kasus pelecehan seksual dimana perempuan identik dengan tindak kekerasan seksual yang biasa dilakukan oleh laki-laki. Kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Hal ini karena perempuan seringkali dicirikan sebagai sosok yang lemah, tidak berdaya dan bergantung pada pihak laki-laki. Ciri perempuan tersebut

dimaknai dalam kehidupan masyarakat oleh karena itu pelecehan seksual terhadap perempuan semakin hari bagaikan momok yang menakutkan bagi perempuan di Indonesia hal ini membawa berbagai permasalahan yang serius bagi korban. Masyarakat melakukan segala pembedanya dengan menyalahkan dan memberikan pebelan negatif pada korban pelecehan seksual. Masyarakat seolah-olah tanpa rasa bersalah menjatuhkan putusan dan asumsi bahwa perempuan yang mendapatkan pelecehan seksual tersebut pasti perempuan “nakal” atau perempuan yang sudah tidak suci bahkan perempuan yang kotor dan hina. Kasus seperti ini banyak kita jumpai di Indonesia bahkan sudah menjadi hal yang diwajarkan oleh masyarakat hal tersebut berkontribusi dan menimbulkan *victim blaming*.

Keyakinan budaya tentang kekerasan seksual membantu melestarikan sikap menyalahkan korban yaitu dengan melakukan *victim blaming* dan memaklumi pelaku pemerkosaan serta memperkuat perbedaan kekuatan dan kekuasaan antar jenis kelamin laki-laki dan perempuan (Abbott 1992, hlm.166). Konsep *victim blaming* yang diwajarkan oleh masyarakat menyumbang masalah yang terus menerus dimana korban dipersalahkan melalui kata-kata dan kalimat yang satu waktu digambarkan sebagai korban sekaligus pemicu terjadinya tindak pelecehan seksual yang menimpa dirinya seperti mengomentari cara berpakaian, kedudukan korban, budaya tunduk pada kaum laki-laki, keberadaan korban dan perlawanan korban pada pelaku hal ini tidak dapat dipisahkan dengan diskriminasi gender khususnya pada korban yang sebagian besar adalah kaum perempuan.

Dampak dari *victim blaming* nyata merugikan korban pelecehan seksual, *victim blaming* ini terjadi dalam masyarakat dan khususnya terjadi dikalangan mahasiswa peneliti melihat beberapa fakta dan pengalaman dilingkungan masyarakat. Realita kasus *Victim blaming* pada korban pelecehan seksual melalui muatan berita harian nasional yang menyebutkan bahwa kasus Agni mahasiswa Universitas Gajah Mada (UGM), korban disalahkan hingga depresi. Seperti yang diberitakan *Tempo.com* bahwa korban mengalami tekanan akibat *victim blaming* atau korban disalahkan oleh berbagai

pihak sehingga korban tidak bisa fokus dan terganggu selama menjalani masa pengerjaan skripsi hal ini terjadi karena orang-orang menganggap bahwa Agni merusak nama baik Universitas Gajah Mada (UGM). Pada kasus ini korban trauma dan depresi sehingga korban harus melakukan konseling traumatik (Tempo,2019).

Contoh kasus diatas hanya sebagian kecil ketidakadilan gender dalam bentuk *victim blaming* pada korban pelecehan seksual. Pernyataan lain datang melalui berita yang di muat oleh *kompasiana.com* bahwa *victim blaming* adalah hal menyedihkan karena adanya pihak-pihak yang seakan-akan membenarkan pelaku bahkan tanpa adanya pernyataan yang memalukan korban, korban kasus pelecehan harus merasakan trauma, malu serta beban psikologis yang luar biasa para korban pelecehan seksual harus menerima komentar kejam dan dicurigai, walaupun sudah harus hidup dalam kesendirian, dan tak jarang di isolasi dari teman dan keluarga karena rasa malu (Kompasiana,2018).

Permasalahan mengenai persoalan *victim blaming* menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji, mengingat perbedaan pandangan masyarakat yang melanggengkan ketidakadilan gender melalui tindakan *victim blaming* yang harus di minimalisir dan memberikan ruang aman bagi kaum perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual. Permasalahan pelecehan seksual dimana tidak ada satu Lembaga pun yang memiliki data akurat tentang jumlah kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi. Informasi tentang kasus pelecehan seksual di perguruan tinggi menyebar secara sporadis, muncul saat kasus tersebut menjadi sorotan media. Dalam kasus di lingkungan perguruan tinggi, tak semua korban mempunyai kuasa mengumpulkan tekad untuk melapor kepada teman, pihak kampus, ke polisi, ke Lembaga mitra Komnas Perempuan, atau ke Lembaga pendampingan korban kekerasan seksual. Indonesia (Tirto.id,2016).

Semakin banyak kasus pelecehan seksual sehingga menurut Ketua Sub Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan bahwa kondisi menyalahkan korban ini seolah diperkuat oleh budaya patriarki yang masih dianut bangsa ini dimana posisi

perempuan berada di bawah laki-laki. Banyak kasus pelecehan seksual adalah bukti keseriusan masalah ketidakadilan gender dalam hal ini seluruh pihak wajib untuk meminimalisir terjadinya kasus pelecehan seksual dengan tidak bersikap menyalahkan korban pelecehan seksual namun harapan seperti itu tidak mudah untuk diterapkan di Indonesia. Seperti yang ditemukan dalam penelitian Astuti (2019) bahwa 93% dari 1636 responden yang mengalami pelecehan seksual tidak melapor kasusnya karena berbagai macam faktor survei yang ditemukan bahwa korban tidak mau melapor pelecehan seksual tersebut kepada penegak hukum karena faktor takut disalahkan. Ketakutan lain yang juga menghantui korban pelecehan seksual adalah tidak adanya dukungan dari keluarga, diintimidasi bahkan diancam.

Hal ini menarik untuk diteliti karena korban digambarkan dengan tidak seimbang oleh masyarakat khususnya lingkungan kampus pelecehan seksual di perguruan tinggi sebenarnya bukan hal baru, termasuk di Indonesia beberapa kasus yang terjadi di perguruan tinggi berujung korban tertekan dan tidak berani untuk lapor hal ini terjadi karena kontruksi *victim blaming* khususnya di lakukan oleh mahasiswa itu sendiri ketidak sadaran akan hal ini menyebabkan ketidakadilan terus menerus dan wajarkan oleh sebagian masyarakat, dengan itu peneliti akan berusaha untuk mencari solusi atau penyelesaian dari masalah *victim blaming* pada korban pelecehan seksual khususnya di Universitas Pendidikan Indonesia menurut data Reswara Universitas Pendidikan Indonesia (2019) bahwa sebageian besar mahasiswa mengalami pelecehan seksual dengan berbagai bentuk seperti pelecehan seksual verbal 83.1%, pelecehan non verbal 10.4%, pelecehan seksual fisik 6.4% dengan jumlah angka korban pelecehan yang cukup tinggi namun jumlah korban yang melapor hanya 7% .

Maka dari itu berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “FENOMENA *VICTIM BLAMING* PADA MAHASISWA TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL (Studi Kasus terhadap Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia)”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas peneliti mengajukan rumusan masalah umum dalam penelitian yaitu, “Bagaimana fenomena *victim blaming* pada mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual?”

Agar penelitian ini lebih terarah dan terfokus pada pokok permasalahan, maka masalah umum tersebut penulis jabarkan ke dalam rumusan masalah khusus yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk-bentuk *victim blaming* yang terjadi pada korban pelecehan seksual di Universitas Pendidikan Indonesia?
2. Apa saja faktor-faktor yang dapat memicu *victim blaming* mahasiswa pada korban pelecehan seksual di Universitas Pendidikan Indonesia?
3. Bagaimana dampak *victim blaming* terhadap korban pelecehan seksual?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Suatu hasil penelitian tentunya terdapat tujuan-tujuan penulisnya, secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk menggambarkan “Fenomena *victim blaming* pada mahasiswa terhadap korban pelecehan seksual.

Adapun secara khusus, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk *victim blaming* yang terjadi pada korban pelecehan seksual.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya *victim blaming* mahasiswa pada korban pelecehan seksual.
3. Mendeskripsikan dampak *victim blaming* pada korban pelecehan seksual

## 1.4 Manfaat Penelitian

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta memperluas wawasan keilmuan yang bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang Sosiologi khususnya Sosiologi Gender.

Secara praktis hasil penelitian memiliki manfaat sebagai berikut ini :

a. Bagi Masyarakat

Hail penelitian ini dapat menambah wawasan mahasiswa tentang pentingnya mengetahui tindakan *victim blaming* merupakan masalah dalam masyarakat.

b. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi universitas dalam mengkaji fenomena *victim blaming* yang terjadi di sekitar kampus dalam upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman, kondusif dan nyaman bagi mahasiswa maupun civitas akademiknya.

c. Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi

Memberikan informasi baru mengenai adanya fenomena *victim blaming* pada korban pelecehan seksual lalu penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan pembelajaran mengenai stereotip terhadap gender.

d. Bagi peneliti sebagai mahasiswa sosiologi tentunya harus mengetahui dan memahami bahwa adanya fenomena *victim blaming* mahasiswa pada korban pelecehan seksual, diharapkan penelitian ini meminimalisir fenomena *victim blaming* pada korban pelecehan seksual, karena korban harus didampingi tanpa adanya gangguan.

### 1.5 Struktur Organisasi

Stuktur organisasi dalam penelitian skripsi dibuat dalam 5 bab dengan masing-masing bab memiliki isi yang berbeda dan disusun secara sistematis. Secara garis besar isi dari masing – masing bab akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut.

1. Bab I : Pendahuluan menjelaskan pendahuluan , peneliti akan menguraikan mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta struktur organisasi skripsi.

2. Bab II : menjelaskan mengenai kajian pustaka yang memuat berbagai teori-teori relevan yang sesuai dengan tema penelitian.
3. Bab III : Metode penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan desain penelitian, metode penelitian, Teknik pengumpulan data, serta tahapan yang digunakan dalam penelitian.
4. Bab IV : memaparkan temuan dan pembahasan, bab ini peneliti akan menganalisis data yang telah terkumpul pada penelitian yang sudah dilakukan melalui data yang didapatkan.
5. Bab V : Simpulan, implikasi dan rekomendasi dalam bab ini peneliti melalui hasil analisis data yang telah dilakukan dalam temuan peneliti mencoba memberikan simpulan dan saran sebagai rekomendasi atas permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian skripsi.

